



RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan ridhoNya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru Tahun 2020–2024 dapat diselesaikan.

Renstra LKKPN Pekanbaru ini merupakan petunjuk yang digunakan oleh organisasi dalam lingkup LKKPN Pekanbaru untuk mengelola kondisi saat ini menuju pencapaian tujuan periode 2020 – 2024. Penyusunan Renstra ini menjabarkan detail penyesuaian rencana program dan kegiatan LKKPN Pekanbaru berdasarkan visi dan misi Presiden melalui RPJMN 2020 – 2024, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

Tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga Rencana Strategis ini tersusun dengan baik. Semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dalam upaya peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis LKKPN Pekanbaru dalam mewujudkan kawasan konservasi perairan nasional yang lestari dan menyejahterakan masyarakat.

Pekanbaru, 24 Desember 2021

Kepala LKKPN Pekanbaru



Fajar Kurniawan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Kondisi Umum.....	6
C. Potensi dan Permasalahan.....	11
1. Potensi	11
2. Permasalahan.....	14
D. Lingkungan Strategis	17
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	18
A. Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan	18
B. Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan.....	18
C. Tujuan.....	19
D. Sasaran	20
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	22
A. Arah Kebijakan dan Strategi	22
B. Strategi Pelaksanaan	22
C. Kerangka Kelembagaan.....	24
INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	28
A. Indikator Kinerja Kegiatan 2020-2024	28
B. Kerangka Pendanaan	32
PENUTUP.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. RPJMN 2020–2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju.

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045 yang meliputi pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Kelima arahan utama Presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, yang terdiri atas:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan kemananan, dan transformasi pelayanan publik.

Presiden juga memberikan dua arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk:

1. Membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil kelautan dan perikanan, dan petambak garam, serta para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan;
2. Memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Dalam menjabarkan RPJMN dan arahan Presiden RI terkait dengan pembangunan Kelautan dan Perikanan tersebut, telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2020–2024 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 serta Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020–2024.

LKKPN Pekanbaru adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang kawasan konservasi perairan nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dimaksud, Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru, menyusun Renstra LKKPN Pekanbaru Tahun 2020–2024 sebagai acuan dan penjabaran agenda pembangunan, arahan Presiden dan Menteri serta Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dalam rangka mencapai tujuan Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Dengan demikian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi basis dalam perwujudan program pengelolaan ruang laut dalam 5 (lima) tahun kedepan.

B. Kondisi Umum

Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Sejalan dengan pembangunan yang berkelanjutan terutama terhadap pemanfaatan sumberdaya ikan dan habitatnya, dan merupakan salah satu langkah menjawab tantangan pengelolaan potensi laut yang lestari dan berkelanjutan.

Di wilayah barat Indonesia, sampai dengan tahun 2020 terdapat 2 (dua) Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) yang pengelolaannya berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui LKKPN Pekanbaru sebagai pelaksananya dengan total luas kawasan 1.305.540,2 Ha. Dua KKPN tersebut adalah Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya (TWP Anambas) di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau seluas 1.262.686,2 Ha, dan Taman Wisata Perairan Pulau Pieh dan Laut di Sekitarnya (TWP Pulau Pieh) yang wilayahnya berada di 3 (tiga) kabupaten/kota (Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman) dengan luas 39.900,0 Ha.

TWP Anambas merupakan KKPN terbesar kedua secara nasional, setelah Taman Nasional Perairan Laut Sawu, dan merupakan KKPN pertama dan terbesar yang diinisiasi dan dibentuk oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sedangkan TWP Pieh merupakan KKPN yang pada awalnya berdirinya dibentuk oleh Departemen Kehutanan dan kemudian diserahkan pengelolaannya ke Departemen Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2009. Dalam konteks pengelolaan, saat ini TWP Anambas dan TWP Pieh merupakan KKPN yang sedang dalam proses menuju pemanfaatan berkelanjutan.

Pengelolaan KKPN juga mempunyai arti penting secara geostrategis dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama terhadap KKPN yang mempunyai posisi di beranda terdepan NKRI, seperti halnya TWP Kepulauan Anambas yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Natuna di Propinsi Kepulauan Riau yang mempunyai posisi sangat strategis karena berdekatan dengan dua negara tetangga yakni Singapura dan Malaysia dan berada di dekat wilayah perairan internasional yang cukup padat aktifitas pelayaran, dengan 255 pulau dimana 5 pulau diantaranya merupakan pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Kawasan konservasi mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian sumberdaya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) serta menunjang program pariwisata bahari nasional. Pengelolaan kawasan konservasi perairan memiliki peran penting dalam memberikan manfaat bagi kelestarian kawasan perairan, juga bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sekitar.

Kawasan konservasi saat ini telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai bagian dari upaya harmonisasi antara pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan melestarikan sumberdaya yang ada bagi masa depan. Upaya pengelolaan kawasan konservasi dilakukan melalui operasionalisasi dan pemanfaatan Kawasan konservasi.

Prinsip pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi adalah tidak terganggunya fungsi utama kawasan konservasi sebagai perlindungan; pelaksanaan pemanfaatan sesuai dengan zonasi kawasan konservasi, daya dukung dan daya tampungnya, dan pelibatan masyarakat sekitar termasuk memastikan akses masyarakat dalam pemanfaatan kawasan konservasi.

Setiap kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi wajib memiliki izin pemanfaatan kawasan konservasi. Perizinan tersebut merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi dapat memberikan manfaat bagi ekosistem dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Perizinan untuk kawasan konservasi yang kewenangan pengelolaannya oleh Menteri Kelautan dan Perikanan diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, sedangkan untuk kawasan konservasi yang kewenangan pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah diatur melalui Peraturan Gubernur.

Pengelolaan kawasan periode 2015-2020 yang dilakukan oleh LKKPN Pekanbaru dalam rangka mewujudkan pengelolaan KKPN yang berkelanjutan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pengelolaan KKPN yang operasional dan dimanfaatkan;
2. Jejaring/kemitraan/kerjasama yang mendukung pengelolaan efektif KKPN; dan
3. Dukungan manajemen Ditjen Pengelolaan Ruang Laut.

Secara garis besar, target Indikator Kinerja Utama (IKU) LKKPN Pekanbaru 2015-2020 telah tercapai dengan baik, antara lain:

1. Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat efektifitas pengelolaannya sebanyak 2 kawasan;
2. Kawasan Konservasi Perairan Nasional Yang Operasional dan Dimanfaatkan di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru seluas 1,3 juta hektar;
3. Kelompok Masyarakat yang menerima bantuan konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru sebanyak 2 kelompok;

4. Kawasan konservasi perairan yang difasilitasi upaya pemanfaatannya untuk peningkatan pendapatan masyarakat sebanyak 2 kawasan;
5. Kemitraan dan Kerjasama Dengan Kelompok Masyarakat Yang Mendukung Pengelolaan Efektif Kawasan Konservasi dan/atau Keanekaragaman Hayati sebanyak 5 kelompok; dan
6. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan LKKPN Pekanbaru dengan meraih penghargaan dari Menteri Kelautan dan Perikanan atas prestasi memperoleh predikat sebagai unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2020.

Kegiatan strategis periode 2015-2020 yang telah dilakukan oleh LKKPN Pekanbaru terkait pengelolaan kawasan konservasi antara lain melakukan monitoring biofisik dan sosial ekonomi kawasan, pemantauan terpadu dalam kawasan konservasi, pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi, sosialisasi regulasi dan peningkatan pemahaman serta kesadaran masyarakat di sekitar kawasan. Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan data series biofisik kawasan telah dimulai sejak Tahun 2015 di TWP Pulau Pieh dan TWP Kepulauan Anambas. Di TWP Pulau Pieh dari Tahun 2016 sampai Tahun 2020, nilai rata-rata tutupan terumbu karang di kawasan tersebut cenderung meningkat dengan rerata sebesar 1,32–4,9 %/ tahun. Nilai rata-rata tutupan terumbu karang di TWP Kepulauan Anambas juga meningkat dari tahun 2018 dengan nilai rerata 0,5–0,93 %/ tahun. Dari Tahun 2015-2020 kondisi ekosistem mangrove di TWP Kepulauan Anambas berada pada kondisi baik dan padat dengan tutupan rata-rata 79,05% dan kerapatan rata-rata sebesar 2750 poho/Ha. Tutupan dan kerapatan ekosistem lamun di TWP Kepulauan anambas meningkat pada Tahun 2020 masing-masing sebesar 0,08 % dan 0,59 ind/m².
2. Penyediaan data series Penyu yang dimulai sejak tahun 2018 di Pulau Pandan dan pada Tahun 2020 di Pulau Bando TWP Pulau Pieh. Jenis penyu yang ditemukan adalah dari jenis Penyu Hijau, Penyu Sisik, dan

Penyu Lekang. Dalam kurun tahun 2018–2020 telah dilakukan pelepasan tukik sebanyak 73.471 ekor.

3. Penyediaan data series cetacean yang dimulai sejak tahun 2015- 2020 di TWP Pulau Pieh. Jenis cetacea yang ditemukan di TWP Pulau Pieh adalah Balaenoptera omurai, Tursiops truncatus, Stenella longirostris, Stenella longirostris roseiventris, Stenella attenuata, Lagenodelphis hosei, Pseudorca crassidens, Peponocephala electra dan Tursiops aduncus. Jenis Stenella longirostris/Lumba-lumba pemintal/ Spinner dolphin merupakan jenis yang sering ditemukan dengan persentase kemuculan sebesar 34,43 %.
4. Terjadi penurunan pelanggaran pemanfaatan di dua kawasan. Rasio pelanggaran pemanfaatan kawasan terhadap jumlah hari pemantuan di TWP Kepulauan Anambas periode 2020 sebesar 1,58 pelanggaran/ hari layar. Di TWP Pulau Pieh rasio pelanggaran pemanfaatan di kawasan tersebut sebesar 0,24 pelanggaran/ hari layar.
5. Dukungan masyarakat terhadap pengelolaan TWP Kepulauan Anambas sangat tinggi yaitu sebesar 96,37 %. Dukungan masyarakat terhadap pengelolaan TWP Pieh sebesar 92,43%.
6. Sampai Tahun 2020 LKKPN Pekanbaru telah menjalin Kerjasama Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi sebanyak 5 mitra antara lain: Kelompok PAP Batu Belah dan kelompok KOMPAS (pengelolaan TWP Kepulauan Anambas), Kelompok Samudera, Kelompok Raja Samudera dan Kelompok CAMAR (untuk pengelolaan TWP Pulau Pieh).
7. Sebanyak 1200 orang masyarakat di lingkup wilayah kerja LKKPN Pekanbaru yang ditingkatkan dukungan/partisipasi nya dalam pengelolaan kawasan. Dan sebanyak 60 orang masyarakat di lingkup wilayah kerja LKKPN Pekanbaru yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pemanfaatan kawasan pada Tahun 2020.
8. LKKPN Pekanbaru juga berperan dalam pemberian bantuan pemerintah untuk Kelompok Penggerak Konservasi (KOMPAK). Sampai Tahun 2020, LKKPN Pekanbaru telah menyalurkan sebanyak

Rp962.711.300 kepada 10 kelompok masyarakat di wilayah TWP Pulau Pieh dan TWP Kepulauan Anambas.

9. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru sampai Tahun 2020 adalah sebanyak Rp27.220.000,-.

C. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Ekosistem pesisir dan keanekaragaman hayati laut, termasuk pulau-pulau kecilnya menyimpan banyak potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan nasional untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya potensi secara individual komponen pembentuk ekosistem, seperti mangrove, lamun, terumbu karang dan ikan karang, namun secara kesatuan mereka membentuk potensi "services" yang dapat dimanfaatkan untuk menambah perputaran ekonomi masyarakat pesisir, yaitu dengan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan.

Kawasan konservasi didefinisikan sebagai kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Penetapan kawasan konservasi merupakan salah satu upaya konservasi ekosistem yang dapat dilakukan terhadap terhadap satu atau beberapa ekosistem penting untuk dikonservasi berdasarkan kriteria ekologis, sosial budaya, dan ekonomis.

Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Pieh dan Laut di Sekitarnya merupakan salah satu kawasan konservasi perairan nasional yang terletak di Provinsi Sumatera Barat tepatnya di sebelah barat wilayah administratif Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman. Kawasan ini terdiri dari beberapa gugusan pulau-pulau kecil yakni Pulau Bando, Pulau Pieh, Pulau Toran, Pulau Pandan, dan Pulau Air, termasuk beberapa gosong dengan luas kawasan keseluruhan mencapai 39.900 Ha.

Kawasan ini merupakan habitat penting bagi ekosistem perairan, terutama perairan dangkal, yaitu ekosistem terumbu karang. Selain itu pulau-pulau kecil yang terdapat di dalam kawasan ini merupakan tempat bertelurnya penyu. Biota penting lain yang terdapat atau bisa ditemui di dalam kawasan adalah hiu, hiu paus, paus, lumba-lumba, kerang-kerangan seperti kima, lola, dan juga biota lainnya. Potensi yang ada dalam kawasan seperti pantai pasir putih yang bersih, adanya habitat perteluran penyu, ekosistem terumbu karang di beberapa titik yang masih bagus, adanya alur perlintasan satwa kharismatik, berbagai jenis ikan hias dan megabenthos lainnya bisa dinikmati keindahannya oleh wisatawan. Kondisi ekosistem di daratan pulau-pulau kecil dalam kawasan masih relatif asri dan di beberapa pulau dijadikan sebagai tempat atau destinasi wisata survival yang banyak diminati dari wisatawan mancanegara.

Terumbu karang yang terdapat di dalam kawasan ini termasuk jenis terumbu karang tepi (*fringing reef*) dan juga ada gosong karang (*patch reef*) dengan kontur yang landai sampai curam (*drop off*) di beberapa titik penyelaman kondisi terumbu karang tersebut masih bagus untuk dinikmati oleh wisatawan. Terumbu karang di perairan TWP Pieh tergolong tipe terumbu tepi (*fringing reef*) dan karang gosong (*patch reef*). Dari hasil analisis Citra Sentinel 2A-2020, total luasan terumbu mencapai 206,35 Ha, terdiri dari rata-rata terumbu tanpa ditutupi makro algae dan padang lamun, komunitas karang yang hidup pada bagian tubir (*reef edge*) dan puncak terumbu (*reef crest*). Sedangkan bagian lain adalah substrat terbuka terdiri dari daratan pesisir pantai pulau, substrat dasar perairan seperti pasir dan karang mati.

Selain terumbu karang, potensi yang sedang dikembangkan untuk menjadi ikon baru di kawasan ini adalah keberadaan penyu dan hewan mamalia laut seperti lumba-lumba dan paus. Keberadaan hewan kharismatik tersebut menjadi potensi pengembangan wisata dalam kawasan yang dibungkus dengan tema wisata *turtle watching* dan *dolphin watching*.

Potensi di bidang perikanan berkelanjutan TWP Pulau Pieh memiliki beberapa ikan pelagis dan ikan karang yang menjadi salah satu ikan ekonomis penting dalam kawasan. Berdasarkan kajian teknis kawasan konservasi tahun 2015, potensi perikanan berkelanjutan di TWP Pulau Pieh dengan nilai Maximum Sustainable Yield (MSY) 1.869,19 kg/hari atau 56.075,67 kg/bulan dimana nilai Total Allowable Catch (TAC) mencapai 1.495,35 kg/hari atau 44.860,54 kg/bulan atau 80 % dari potensi lestari atau MSY.

Dari data RHM (*Reef Health Monitoring*) Tahun 2017-2020 di Perairan TWP Pulau Pieh dan Laut di Sekitarnya terdapat 18 Jenis Ikan Kerapu dari Family Serranidae yang terdiri dari 1 Genus *Aethaloperca*, 10 Genus *Cephalopolis*, 4 Genus *Ephinephelus*, 1 Genus *Gracilla*, 1 Genus *Plectropomus*, dan 1 Genus *Variola*.

Potensi di TWP Kepulauan Anambas juga tidak kalah menarik dibandingkan TWP Pulau Pieh. Potensi yang terdapat di TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya meliputi potensi ekologi, potensi ekonomi, dan potensi sosial budaya.

Potensi ekologis di TWP Kepulauan Anambas memiliki tiga ekosistem pesisir penting yaitu ekosistem terumbu karang, ekosistem mangrove dan ekosistem lamu yang tidak dimiliki oleh TWP Pieh. Ekosistem terumbu karang di kawasan ini terdiri dari tiga tipe, yakni terumbu karang tepi (*fringing reef*), terumbu karang penghalang (*barrier reef*) dan terumbu karang cincin (*atoll*) dengan luas terumbu karang seluas 3.705,84 hektar. Kondisi terumbu karang di beberapa titik monitoring TWP Kepulauan Anambas berada dalam kategori rusak hingga sangat baik. Terumbu karang dengan kondisi sangat baik berada di 9 titik pengamatan, yakni Karang Kuning, Pulau Pasu, Pulau Gemili, Pulau Luyung, Pulau Selai, Pulau Akar, barat laut Pulau Jemaja, Pulau Tokong Malangbiru dan Tanjung Lelan yang bisa dijadikan sebagai spot diving bagi wisatawan. Keberadaan terumbu karang yang luas di kawasan ini menjadi rumah bagi ikan ekonomis penting seperti ikan napoleon, ikan kerapu dan ikan pelagis lainnya. Dengan keberadaan ikan-ikan tersebut

menjadikan wilayah TWP Kepulauan Anambas sebagai salah satu wilayah yang menyumbang bagi peningkatan produksi perikanan khususnya produksi perikanan tangkap.

Berdasarkan kajian teknis kawasan konservasi tahun 2015, potensi perikanan berkelanjutan di TWP Kepulauan Anambas mencapai 107.585,18 ton dengan nilai Maximum Sustainable Yield (MSY) mencapai 35.030,35 ton/tahun dimana nilai Total Allowable Catch (TAC) mencapai 27.305,90 ton/tahun.

TWP Kepulauan Anambas juga memiliki ekosistem mangrove yang sangat baik dengan kerapatan yang padat. Genus mangrove yang ditemukan di Kepulauan Anambas adalah *Avicennia*, *Rhizophora*, *Sonneratia*. Sebaran hutan mangrove di Kabupaten Kepulauan Anambas tidak merata di seluruh kecamatan. Beberapa kecamatan yang memiliki kawasan teluk yang berlumpur dan terlindung merupakan tempat tumbuhnya mangrove. Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Selatan, dan Kecamatan Siantan Tengah adalah beberapa Kecamatan yang memiliki hutan Mangrove. Dibeberapa lokasi seperti Temburun dan Genting Pular keberadaan ekosistem mangrove telah dikembangkan menjadi tempat wisata selain tempat mencari kepiting dan rajungan oleh nelayan.

Selain potensi sumberdaya hayati, TWP Kepulauan Anambas juga memiliki potensi sumber daya non hayati, antara lain minyak bumi, gas alam, pasir laut, dan bahan tambang mineral; dan Jasa - jasa lingkungan (environmental services) seperti media transportasi dan komunikasi, serta energi laut.

2. Permasalahan

Pada saat ini LKKPN Pekanbaru memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program serta kegiatan. Tantangan ini sebagian merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari rentang kerja sebelumnya, dan juga yang muncul sebagai akibat dari visi misi Presiden periode 2020 – 2024 serta dinamika

yang terjadi di kawasan. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh LKKPN Pekanbaru antara lain:

- 1) Belum efektifnya pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru.

Efektifitas pengelolaan suatu kawasan konservasi perairan menjadi sedemikian penting mengingat selain memberikan manfaat bagi kelestarian kawasan perairan, pengelolaan kawasan konservasi perairan juga harus bermanfaat bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Efektifitas pengelolaan kawasan perairan juga berkaitan dengan bagaimana membangun sebuah pengelolaan kawasan yang akuntabel, mandiri dan berkelanjutan.

Selain itu, upaya penyesuaian terhadap Kepmen KP Nomor 38/KEPMEN-KP/ 2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Pulau Pieh dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat 2014-2034 dan Kepmen KP nomor 53/KEPMEN-KP/ 2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau 2014-2034 akan dilakukan sebagai dasar pengelolaan kawasan yang efektif dan berkelanjutan.

- 2) Peran aktif masyarakat di sekitar kawasan konservasi perairan nasional di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru belum optimal.

Eksplorasi sumberdaya tidak ramah lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat di dalam atau di sekitar kawasan konservasi sering terjadi sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan ekosistem dalam kawasan konservasi. Upaya pemantauan terhadap aktifitas yang merusak yang dilakukan oleh pengelola cukup terbatas karena luasnya area yang akan dipantau maupun keterbatasan sumberdaya pengelola. Untuk itu peran dan partisipasi masyarakat sekitar kawasan konservasi dalam pengelolaan kawasan konservasi dibutuhkan dengan menerapkan model pengelolaan kolaboratif yang memungkinkan para pemangku kepentingan berperan dan berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan konservasi.

- 3) Pengendalian dan pemanfaatan ruang laut dalam kawasan konservasi perairan nasional di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru belum terkelola dan terdata dengan baik.

Pengendalian dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang laut berupa izinlokasi dan izin pengelolaan dan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Implementasi pengendalian ruang laut ini juga belum ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ditjen PRL telah menginisiasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2020 tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, dan Izin Lokasi di Laut dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Untuk mempermudah proses pengajuan perizinan berusaha pemanfaatan ruang di Laut, masyarakat dapat menggunakan aplikasi Si-Handal (Sistem Perizinan Berusaha di Perairan dan Laut) dengan alamat website: <http://sihandal.kkp.go.id>. LKKPN Pekanbaru akan berkontribusi terhadap pendataan dan verifikasi pemanfaatan ruang laut dalam kawasan konservasi perairan nasional yang ada di wilayah kerja melalui:

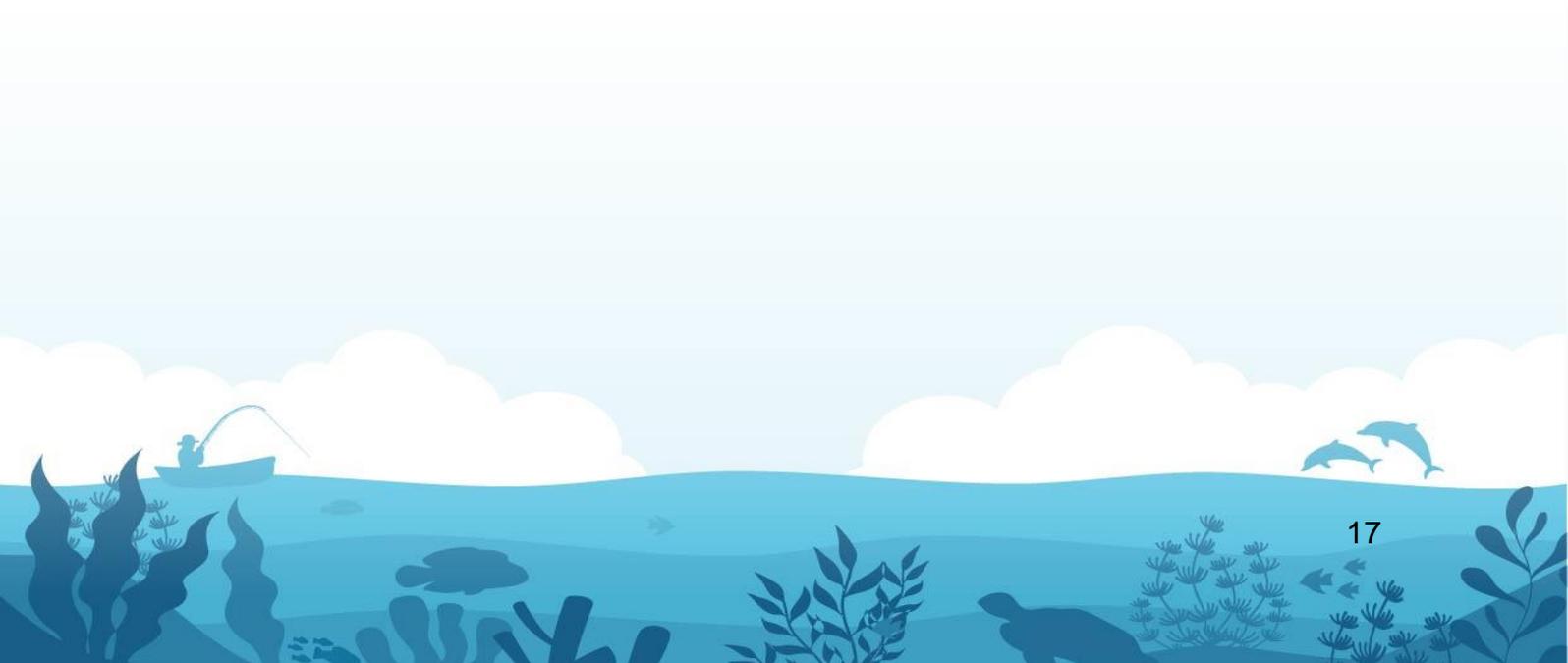
- Monitoring pemanfaatan ruang laut untuk mengecek kesesuaian pemanfaatan ruang laut eksisting dengan rencana tata ruang /zonasi
- 4) Belum optimalnya pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) LKKPN Pekanbaru yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

D. Lingkungan Strategis

Pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional tidak dapat dilepaskan dari perkembangan lingkungan strategis yang mencakup lingkungan internal dan eksternal. Pada tahun 2020-2024, pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru dipengaruhi oleh lingkungan internal, diantaranya pengelolaan kawasan konservasi yang efektif, tata kelola ruang laut dalam kawasan konservasi, konservasi keanekaragaman hayati, keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya hayati, dan potensi pemanfaatan ekonomi sumberdaya kelautan yang saat ini belum dikelola secara optimal.

Untuk lingkungan eksternal diantaranya, masih adanya kegiatan eksploitasi sumberdaya dalam kawasan konservasi yang tidak sesuai atauran yang dilakukan oleh masyarakat di dalam maupun di sekitar kawasan konservasi, adanya konflik kepentingan pemanfaatan ruang laut dalam kawasan konservasi, pemanfaatan ruang laut dalam kawasan konservasi yang belum optimal, rentannya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil dalam kawasan konservasi dan marine debris.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi KKP tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mendukung visi KKP, maka Visi Ditjen PRL 2020–2024 adalah “Pengelolaan Ruang Laut Yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP”. Dengan demikian Visi LKKPN Pekanbaru adalah “Pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru Menuju Terwujudnya Visi DJPRL”.

B. Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;
2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;

3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

Dalam rangka mendukung misi KKP tersebut, Ditjen PRL mempunyai 3 (tiga) misi yaitu:

1. peningkatan kontribusi ekonomi sub sektor kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. peningkatan kelestarian sumber daya kelautan, pesisir dan pulau – pulau kecil; dan
3. peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Ditjen PRL.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut dan dalam rangka mewujudkan Visi LKKPN Pekanbaru, maka ditetapkan Misi LKKPN Pekanbaru yaitu:

1. Perencanaan ruang laut di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru;
2. Perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru; dan
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkungan LKKPN Pekanbaru

C. Tujuan

Menjabarkan misi di atas, LKKPN Pekanbaru merumuskan tujuan pengelolaan Kawasan konservasi perairan nasional 2020-2024 sebagai berikut:

1. Misi Perencanaan Ruang Laut di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru dengan tujuan meningkatkan pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru;
2. Misi Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru dengan tujuan meningkatkan pengelolaan

kawasan konservasi perairan nasional di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru; dan

3. Misi Peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkungan LKKPN Pekanbaru dengan tujuan meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi di lingkungan LKKPN Pekanbaru.

D. Sasaran

Sasaran pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional di bawah kewenangan LKKPN Pekanbaru merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh LKKPN Pekanbaru dari hasil pelaksanaan program pengelolaan perikanan dan kelautan, kualitas lingkungan hidup dan program dukungan manajemen. Adapun sasaran kegiatan LKKPN Pekanbaru Tahun 2020–2024 dijabarkan sebagai berikut:

I. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

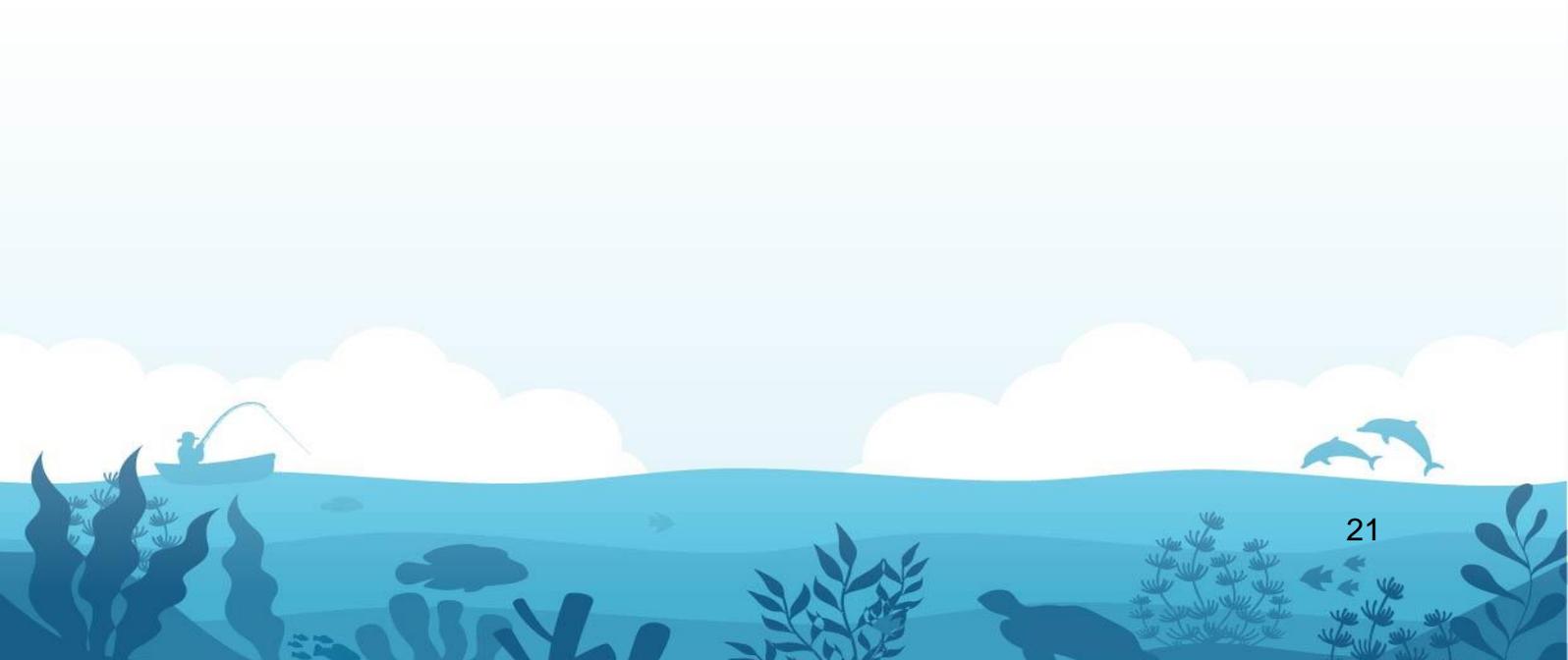
1. Tujuan meningkatkan pengendalian pemanfaatan Kawasan konservasi perairan nasional di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru dengan sasaran kegiatan meningkatnya penataan ruang laut di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru;

II. Program Kualitas Lingkungan Hidup

2. Tujuan meningkatkan pengelolaan Kawasan konservasi perairan nasional di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru dengan sasaran kegiatan:
 - a. Tercapainya pengelolaan kawasan konservasi yang lestari dan berkelanjutan di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru;
 - b. Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru;
 - c. Meningkatnya jejaring, kemitraan/kerjasama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati Laut di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru;

III. Program Dukungan Manajemen

3. Tujuan meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi LKKPN Pekanbaru dengan sasaran kegiatan tatakelola pemerintahan yang baik di LKKPN Pekanbaru.



BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah merumuskan 5 (lima) arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020 - 2024, salah satunya adalah “Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait”. Ditjen PRL sebagai salah satu unit eselon I Lingkup KKP telah merumuskan arah kebijakan tahun 2020 – 2024 yang memerlukan dukungan Unit Pelaksana Teknis di daerah, khususnya LKKPN Pekanbaru yaitu:

- 1) Penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang partisipatif, serasi dan implementatif;
- 2) Pengelolaan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati perairan yang lestari dan berkelanjutan;
- 3) Tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen PRL.

B. Strategi Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan yang akan ditempuh untuk masing-masing arah kebijakan di atas adalah sebagai berikut:

1. Penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang partisipatif, serasi dan implementatif melalui:
 - a. Kegiatan pemanfaatan ruang laut dan pengendalian pemanfaatan ruang laut berupa monitoring pemanfaatan Ruang Laut dalam kawasan konservasi perairan nasional di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru;
 - b. Dukungan operasionalisasi KKPRL dan/atau insentif pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru

- c. Pengelolaan data Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dalam kawasan konservasi perairan nasional di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru.
2. Pengelolaan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati perairan yang lestari dan berkelanjutan melalui:
 - a. Penyediaan sarana dan prasarana kawasan konservasi perairan nasional di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru;
 - b. Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia pengelola kawasan konservasi perairan di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru;
 - c. Penyediaan data series kawasan konservasi perairan nasional di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru;
 - d. Monitoring implementasi zonasi kawasan konservasi perairan nasional di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru;
 - e. Penyadartahuan masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya kawasan konservasi perairan nasional di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru;
 - f. Penyusunan daya dukung dan daya tampung kegiatan pemanfaatan dalam kawasan konservasi perairan nasional di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru;
 - g. Fasilitasi izin akses masyarakat (nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, masyarakat lokal/ adat/ tradisional) dalam pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional seperti pendataan, sosialisasi, dan dukungan pengembangan ekonomi masyarakat (pembinaan, pelatihan/ bimbingan teknis, bantuan konservasi) di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru;
 - h. Pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru;
 - i. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru;
 - j. Inisiasi dan pelaksanaan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi perairan nasional di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru;

- k. Pelaksanaan tata kelola pendaanaan berkelanjutan kawasan konservasi perairan nasional di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru;
 - l. Pemberian bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru; dan
 - m. Monitoring dan Evaluasi bantuan KOMPAK di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru
3. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan LKKPN Pekanbaru melalui:
- a. Pengelolaan SDM Aparatur dan tata laksana di LKKPN Pekanbaru;
 - b. Penguatan akuntabilitas kinerja di LKKPN Pekanbaru;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik di LKKPN Pekanbaru; dan
 - d. Pengelolaan keuangan, barang milik negara, pengadaan barang jasa dan umum di LKKPN Pekanbaru.

C. Kerangka Kelembagaan

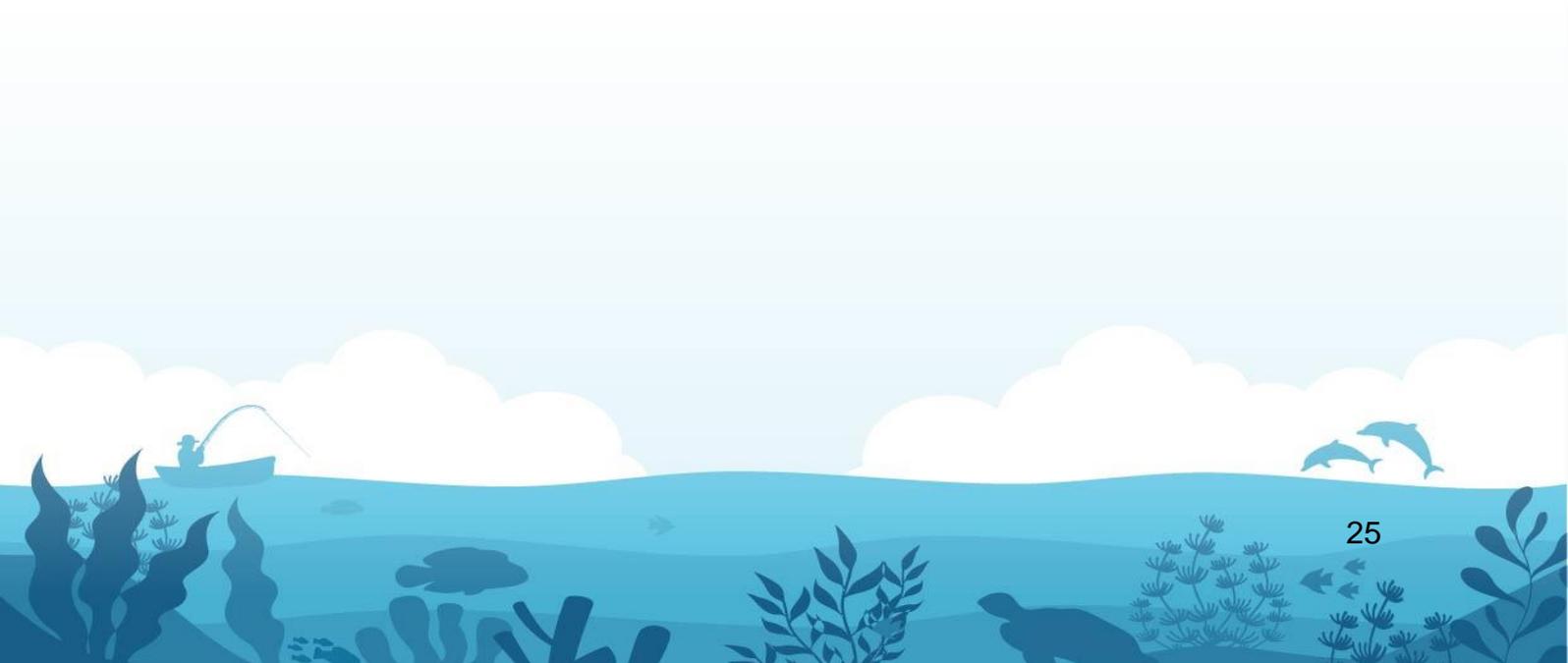
Struktur organisasi LKKPN Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut terdiri dari Kepala, Urusan Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional.

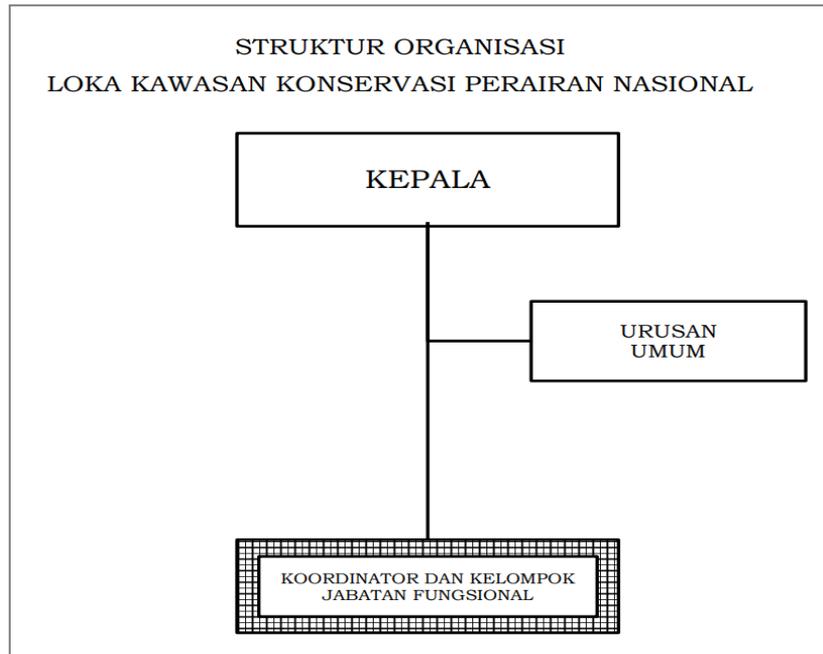
Total SDM yang dimiliki LKKPN Pekanbaru hingga tahun 2021 dalam menunjang pencapaian tujuan organisasi adalah 62 orang, yang terdiri dari 41 berstatus sebagai ASN, dan 21 Tenaga Kontrak dengan komposisi sebagai berikut :

1. Urusan Umum, dengan jumlah SDM 8 (delapan) orang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Analis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama;
 - b. 2 (dua) orang Pranata Keuangan APBN Mahir;
 - c. 1 (satu) orang Penata Laksana Barang Terampil;
 - d. 1 (satu) orang Arsiparis Pelaksana Lanjutan;
 - e. 1 (satu) orang Analis Keuangan;

- f. 1 (satu) orang Analis Sumber Daya Manusia Aparatur; dan
 - g. 1 (satu) orang Analis Barang Milik Negara.
2. Pelaksana Program dan Evaluasi, dengan jumlah SDM 5 (lima) orang terdiri atas:
- a. 3 (tiga) orang Analis Perencanaan; dan
 - b. 2 (dua) orang Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
3. Pelaksana Pendayagunaan dan Pelestarian, dengan jumlah SDM 28 orang yang terdiri atas:
- a. 2 (dua) orang Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Muda;
 - b. 15 (lima belas) orang Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Pertama;
 - c. 6 (enam) orang Analis Kelautan dan Perikanan;
 - d. 4 (empat) orang Analis Konservasi Kawasan; dan
 - e. 1 (satu) orang Pengelola dan Pemelihara Konservasi Lingkungan dan Kawasan Konservasi.

Untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang semakin kompleks, ke depan diperlukan pengembangan SDM yang lebih profesional dengan penambahan Jabatan Fungsional (JF) lain yang ada di Direktorat Jenderal PRL, yaitu JF Analis Pengelolaan Jasa Kelautan, JF bidang perencanaan dan pentaan ruang laut serta JF lainnya. Untuk lebih jelas, struktur organisasi LKKPN Pekanbaru dapat dilihat pada bagan berikut:

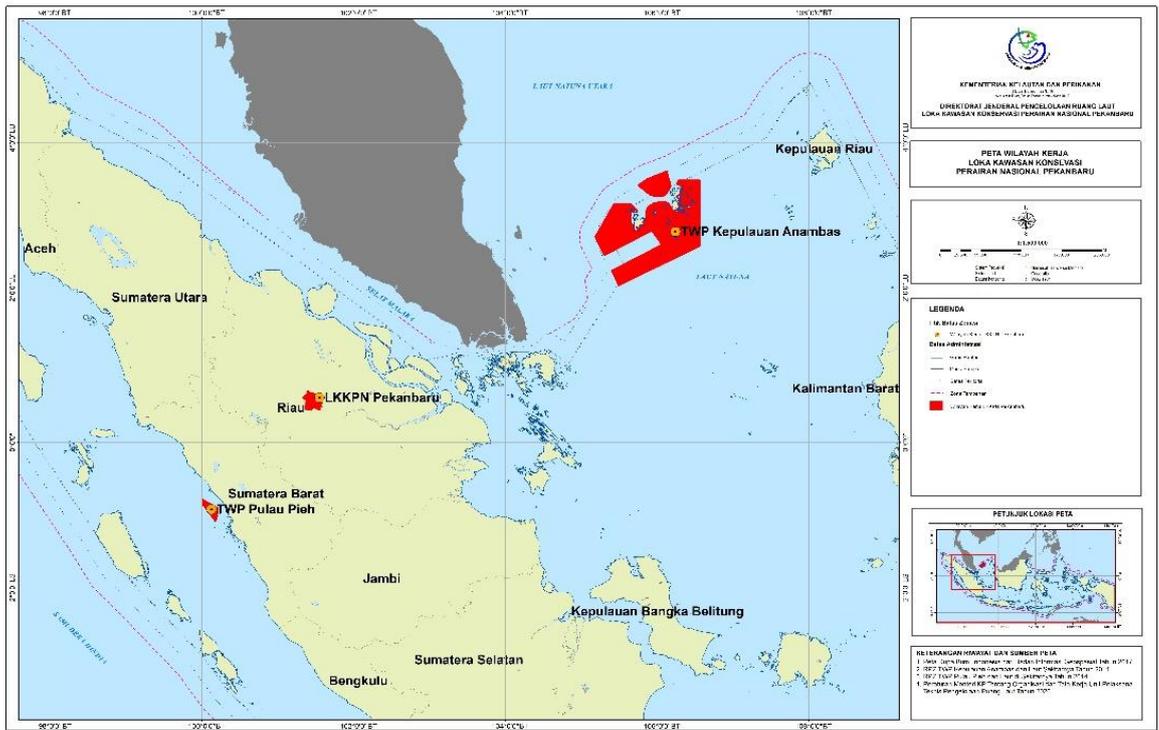




Struktur Organisasi LKKPN Pekanbaru

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan dan rentang kendali yang lebih dekat, maka sebagian dari SDM tersebut ditempatkan di dua kawasan konservasi perairan nasional yang menjadi kewenangan pengelolaan LKKPN Pekanbaru. Wilayah kerja LKKPN Pekanbaru adalah di dua lokasi yaitu kawasan konservasi perairan nasional TWP Pulau Pieh dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat dan kawasan konservasi perairan nasional TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada peta dibawah ini.

PETA WILAYAH KERJA LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU



Peta Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru

BAB IV

INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Indikator Kinerja Kegiatan 2020-2024

Upaya pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 yang dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Ditjen PRL, maka LKKPN Pekanbaru telah menyusun kegiatan beserta sasaran dan indikator kinerja yang mendukung pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Sasaran kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan LKKPN Pekanbaru 2020-2024 dapat dilihat pada matriks dibawah ini:

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN LKKPN PEKANBARU 2020 - 2024

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP							
1	Tercapainya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang lestari dan berkelanjutan di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru	1 Kawasan Konservasi Perairan Nasional di lingkup wilayah kerja LKKPN Pekanbaru yang operasional dan dimanfaatkan (Juta ha)	1,3	-	-	-	-
2	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru	2 Persentase peningkatan nilai efektivitas Kawasan Konservasi Perairan Nasional Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (%)	-	5	5	5	5
3	Meningkatnya jejaring, kemitraan/kerjasama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati Laut di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	3 Kelompok masyarakat yang menerima bantuan konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Kelompok)	2	4	4	4	4
		4 Kesepakatan Jejaring, Kemitraan /Kerjasama dan Konvensi dalam mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Kesepakatan)	2	2	2	2	2

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN							
4	Meningkatnya penataan ruang laut di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru	5 Laporan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut, Penyelenggaraan KKPRL di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (dokumen)	-	-	2	2	2
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
5	Tatakelola pemerintahan yang baik di LKKPN Pekanbaru	6 Persentase Pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB LKKPN Pekanbaru (%)	100	-	-	-	-
		7 Dokumen SPIP LKKPN Pekanbaru yang Diselesaikan (Dokumen)	4	-	-	-	-
		8 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	72,5	72,5	73,5	74,5	75,5
		9 Indeks Profesionalitas ASN LKKPN Pekanbaru (indeks)	72	73	74	75	76
		10 Nilai WBK LKKPN Pekanbaru (Nilai)	75	75	80	83	85
		11 Nilai Rekonsiliasi Kinerja LKKPN Pekanbaru (%)	90	91	92	93	95
		12 Persentase unit kerja LKKPN Pekanbaru yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90
		13 Rekomendasi hasil pengawasan lingkup LKKPN Pekanbaru yang	60	65	70	75	80

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
		dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)					
14		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) LKKPN Pekanbaru (Nilai)	88	89	89	90	90
15		Nilai Kinerja Anggaran LKKPN Pekanbaru (Nilai)	85	86	87	88	89
16		Persentase penyelesaian temuan LHP BPK LKKPN Pekanbaru (%)	100	100	100	100	100

B. Kerangka Pendanaan

Kerangka indikasi pendanaan LKKPN Pekanbaru tahun 2020-2024 adalah sebesar Rp.71,350 Miliar, secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Indikator kinerja dan indikasi pendanaan LKKPN Pekanbaru 2020-2024 disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024, dan belum memperhitungkan dampak pandemi global Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020.



BAB V

PENUTUP

Renstra LKKPN Pekanbaru tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan, yang disusun untuk menjabarkan secara teknis RPJMN Tahun 2020-2024 (Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020), Renstra KKP tahun 2020-2024 (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020), dan Renstra Ditjen PRL tahun 2020-2024 (Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2021).

Renstra LKKPN Pekanbaru tahun 2020-2024 ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan LKKPN Pekanbaru dan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan pada periode 2020-2024 di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru, serta akan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra LKKPN Pekanbaru tahun 2020-2024 ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan juga dihasilkan berkat adanya dukungan stakeholders dan dukungan sektor terkait lainnya serta masyarakat luas. Kerja keras dari seluruh jajaran KKP dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

MATRIK KERANGKA PENDANAAN

LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU TAHUN 2020-2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL 2020- 2024
TOTAL LKKPN PEKANBARU							9,450	13,750	14,950	16,050	17,150	71,350
Program Kualitas Lingkungan Hidup							2,250	6,150	6,550	7,050	7,550	29,550
Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut							2,250	6,150	6,550	7,050	7,550	29,550
	Tercapainya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang lestari dan berkelanjutan di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru						1,900	-	-	-	-	1,900
	Kawasan Konservasi Perairan Nasional di lingkup wilayah kerja LKKPN Pekanbaru yang operasional dan dimanfaatkan (Juta ha)	1,3	-	-	-	-						
	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru						-	5,600	6,000	6,500	7,000	25,100

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)						
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL 2020- 2024	
	Persentase peningkatan nilai efektivitas Kawasan Konservasi Perairan Nasional Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (%)		5	5	5	5							
	Meningkatnya jejaring, kemitraan/kerjasama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati Laut di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru						0,350	0,550	0,550	0,550	0,550	2,550	
	Kelompok masyarakat yang menerima bantuan konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Kelompok)	2	4	4	4	4							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)						
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL 2020- 2024	
	Kesepakatan Jejaring, Kemitraan /Kerjasama dan Konvensi dalam mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Kesepakatan)	2	2	2	2	2							
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							0	0	0,400	0,500	0,600	1,500	
Perencanaan Ruang Laut							0	0	0,400	0,500	0,600	1,500	
	Meningkatnya penataan ruang laut di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru						0	0	0,400	0,500	0,600	1,500	
	Laporan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut, Penyelenggaraan KKPRL di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (dokumen)	-	-	2	2	2							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL 2020- 2024
Program Dukungan Manajemen						7,200	7,600	8,000	8,500	9,000	40,300	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Ruang Laut						7,200	7,600	8,000	8,500	9,000	40,300	
	Tatakelola pemerintahan yang baik di LKKPN Pekanbaru						7,200	7,600	8,000	8,500	9,000	40,300
	Persentase Pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB LKKPN Pekanbaru (%)	100	-	-	-	-						
	Dokumen SPIP LKKPN Pekanbaru yang Diselesaikan (Dokumen)	4	-	-	-	-						
	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	72,5	72,5	73,5	74,5	75,5						
	Indeks Profesionalitas ASN LKKPN Pekanbaru (indeks)	72	73	74	75	76						
	Nilai WBK LKKPN Pekanbaru (Nilai)	75	75	80	83	85						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL 2020- 2024
	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LKKPN Pekanbaru (%)	90	91	92	93	95						
	Persentase unit kerja LKKPN Pekanbaru yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90						
	Rekomendasi hasil pengawasan lingkup LKKPN Pekanbaru yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	60	65	70	75	80						
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) LKKPN Pekanbaru (Nilai)	88	89	89	90	90						
	Nilai Kinerja Anggaran LKKPN Pekanbaru (Nilai)	85	86	87	88	89						
	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK LKKPN Pekanbaru (%)	100	100	100	100	100						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL 2020- 2024
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana internal/overhead lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	100	100	100	100	100						
	Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup LKKPN Pekanbaru (bulan)	12	12	12	12	12						